



PERKEMBANGAN KONDISI EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA MASA HINDIA BELANDA TAHUN 1900-1940

Risma Rahmawati
Universitas Jember

Email: RismaRahma3636@gmail.com

Abstract

The presence of the Dutch in Indonesia has a great influence on the economic life of the Indonesian nation. The Indonesian people continue to experience economic development in their lives, the economic developments faced by the Indonesian people have an impact on the lives of Indonesian people at that time. This study uses the historical method which has four steps, including heuristics, verification, interpretation and historiography. With this, the researchers tried to study the economic development of the Indonesian nation with the following problem formulation 1). How was the economic development of the Dutch East Indies in 1900 – 1940 2). What is the impact of economic development on the lives of local people. The results of this study found that the colonial government formed many policies in all sectors of life, all of which aimed to create a more optimal government system, especially from an economic perspective. However, all these efforts did not have any impact on the better life of the people of the Dutch East Indies, on the contrary, the people of the Dutch East Indies continued to be exploited.

Keywords: Colonial period, development, economy

Abstrak

Kehadiran bangsa belanda di Indonesia memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terus mengalami perkembangan ekonomi dalam kehidupannya, perkembangan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia membawa dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu. Penelitian ini menggunakan metode historis yang memiliki empat langkah, diantaranya heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Dengan adanya hal tersebut peneliti berusaha mengkaji tentang perkembangan ekonomi bangsa Indonesia dengan rumusan masalah sebagai berikut 1). Bagaimana perkembangan ekonomi masa Hindia Belanda tahun 1900 – 1940 2). Bagaimana dampak perkembangan ekonomi terhadap kehidupan masyarakat lokal. Hasil penelitian ini menemukan pemerintah Kolonial membentuk banyak kebijakan pada semua sektor kehidupan, dimana semuanya bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih maksimal, terutama dari segi ekonomi. Namun, semua upaya tersebut sama sekali tidak berdampak pada semakin baiknya kehidupan rakyat Hindia Belanda, justru sebaliknya rakyat Hindia Belanda terus tereksplorasi.

Kata kunci: Masa Kolonial, perkembangan, ekonomi



PENDAHULUAN

Memasuki abad 20 pemerintah Kolonial Hindia Belanda semakin memperluas kekuasaannya. Dimana wilayah yang berhasil dikuasai hampir dari keseluruhan wilayah kepulauan Indonesia. Selain itu pembukaan terusan suez dan perkembangan teknologi kapal uang menjadikan perjalanan antar benua semakin dipermudah. Karena semakin mudahnya hubungan antar benua ini mengakibatkan datangnya beberapa masyarakat yang bermigrasi ke Indonesia. Kedatangan mereka di Indonesia salah satunya di sebabkan karena mereka melihat peluang ekonomi yang besar di Indonesia. Tidak sedikit dari para imigran yang menanamkan modal di Indonesia melalui pemerintah Hindia Belanda. Perkembangan ekonomi memberikan keuntungan yang tidak sedikit bagi pemerintah Hindia Belanda.

Keadaan Hindia Belanda menunjukkan perkembangan ekonomi yang positif dan menguntungkan, dimana sistem kapitalisme menguasai sistem perekonomian Kolonial. Jaringan perdagangan lokal dan internasional mengakibatkan terbentuknya terbuntaknya pasar pasar yang menguntungkan perekonomian. Karena besarnya keuntungan, pemerintah belanda terus berusaha untuk mengeksplorasi sumber daya dan kekayaan yang ada di Indonesia. Eksplorasi yang di lakukan oleh pemerintah Kolonial tidak hanya berpusat di Jawa, tetapi juga di wilayah luar Jawa. Bersamaan dengan ini gerakan penanaman modal semakin meningkat dan meluas di Sektor perekonomian. Sektor perdagangan di Hindia Belanda berkembang sejalan dengan sistem penanaman modal, hal ini mengakibatkan perekonomian belanda menjadi bagian dari jaringan perekonomian dunia.

Dari keterangan tersebut, maka penulis ingin mengkaji tentang bagaimana perkembangan kondisi ekonomi di Indonesia pada masa Hindia Belanda serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk menyusun atikel, adalah metode historis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Gotschalk dalam (Prasetya Santosa & Noviyanti, 2020) bahwa metode historis adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan sejarah masa lampau. Langkah-langkah metode historis diantaranya:

1. Heuristik, Dalam tahap heuristik, penulis mencari sumber yang relevan dan sesuai kebutuhan tema yang ditulis. Hal yang paling ditekankan adalah kevalidan serta relevan tidaknya sumber sejarah, baik itu sumber primer maupun sekunder. Sumber sekunder yang digunakan adalah jurnal dan buku.
2. Kritik Sumber, Setelah tahapan pencarian sumber, tahapan selanjutnya adalah tahapan kritik. Pada tahap ini, penulis melakukan kritik terhadap sumber yang telah didapat dengan cara memilih sumber mana yang relevan dan sinkron dengan tema disertai dengan sumber yang akurat dan valid. Kritik sumber merupakan sebuah kegiatan pengujian yang dilakukan secara kritis terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan. Kritik akan dilakukan secara intern. Penyeleksian terhadap sumber dilakukan oleh peneliti guna memilah mana sumber yang berkaitan dengan tema penelitian.
3. Interpretasi, Tahap selanjutnya adalah intepretasi, dimana penulis menggabungkan serta menafsirkan data dan sumber yang

telah diperoleh. Interpretasi sering disebut sebagai bidang subjektivitas (Kuntowijoyo, 2005). Guna intepretasi ini adalah untuk mempermudah penulisan pada tahapan selanjutnya.

4. Historiografi, Historiografi merupakan tahapan terakhir mulai dari awal heuristik, kritik sumber, hingga intepretasi. Tahapan hitoriografi ini mencakup seluruh tahapan yang sudah dilakukan sebelumnya untuk dijadikan satu kesatuan tulisan sejarah yang kronologis dan valid.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kapitalisme Kolonial pada awal abad 20 mengalami perkembangan yang bisa dikatakan sebagai perkembangan yang baik dan membawa keberuntungan. Hal ini di buktikan dengan semakin besarnya aliran emas di Indonesia, produksi gula yang meningkat, antara tahun 1904-1913. Selain emas dan gula hasil alam lain seperti teh, karet, tembakau, lada, beras, kapuk, dan timah juga mengalami peningkatan. Peningkatan hasil alam tersebut memberikan keuntungan karena produksi mengalami peningkatan yang pesat yaitu dari 75 juta gulden menjadi 305 juta gulden. Dari penjelasan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa pada masa ini sebagian besar masyarakat bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Selain perkebunan dan pertanian, sejak tahun 1890 sampai abad XX awal pembangunan pelabuhan semakin meningkat, hal ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah industri di perkotaan. Kegiatan ekonomi industri ini di tujukan untuk menghasilkan suatu produksi yang dibutuhkan oleh pihak luar misalnya orang eropa. Selain pembangunan pelabuhan yang meningkat, sarana dan prasarana di kota turut mengalami kemajuan dalam pembangunan. Diantaranya pembangunan di sektor maritime, politik, ekonomi, serta sarana dan

prasarana. dengan pembangunan industri yang semakin berkembang, tidak sedikit masyarakat desa yang berpindah ke kota untuk bekerja. Akibat dari banyaknya perpindahan penduduk yang tidak teratur ini mengakibatkan munculnya berbagai macam wabah penyakit (Lapian & Lapian, 2012).

Terlepas dari bagaimana keadaan rakyat pemerintah Kolonial tetap memperoleh keuntungan yang besar dari sistem ekonomi yang mereka terapkan. Semakin besarnya keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah Kolonial membuat mereka semakin gencar dalam memperluas eksploitasi di Indonesia, hal ini tentu saja bertujuan untuk meningkatkan keuntungan ekonomi pemerintah Hindia Belanda. Salah satu bukti pernyataan bahwa pemerintah menguntungkan kaum pengusaha dan merugikan masyarakat yaitu adanya pembatalan pajak ekspor untuk minyak tanah dan pengurangan pembayaran pajak oleh pabrik gula, hal ini tentu saja memberikan kerugian yang besar bagi Negara. Sedangkan pajak masyarakat semakin ditingkatkan hingga 40% (untuk pulau Jawa dan Madura) pada masa pemerintahan Fock, hal ini didasarkan atas laporan mayer Ranneftuender. Eksploitasi berlebihan ini lah yang nantinya menumbuhkan dan memunculkan adanya gerakan pertentangan dari rakyat atau disebut juga gerakan nasional (Djoened & Poesponegoro, 2008).

Dalam masa pemerintahannya pemerintah menerapkan beberapa kebijakan ekonomi di Indonesia diantaranya.

a. Kebijakan Anggaran

Memasuki abad 20 ada perubahan di bidang keuangan pemerintahan. Dalam UU tahun 1903 di putuskan bahwa mata uang antara hindia dan belanda akan dipisahkan, perubahan selanjutnya adalah UU Perusahaan Hindi Belanda tahun 1927 yang berkaitan dengan pembukuan yang



mencatat pengeluaran pemerintahan untuk perusahaan swasta (Lapian & Lapian, 2012).

Pada tahun 1890-an koloni menerima pemasukan yang semakin meningkat sebanyak kurang lebih 20%, pemasukan ini berasal dari semakin meningkatnya hasil pertanian Negara. meski Negara mengalami peningkatan pendapatan, anggaran belanja pemerintah juga bertambah dalam jumlah yang besar. Peningkatan anggaran kemudian mengakibatkan semakin bertambahnya beban pajak masyarakat, pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat diantaranya pajak paten (1904), pajak pendapatan (1913), serta pajak pendapatan dan perusahaan (1926). Kemudian menjelang tahun 1920 an dasar keuangan Negara diperkuat dengan meluasnya perusahaan negara seperti kereta api, telegraf, dan pertambangan. Karena perluasan perusahaan, pajak pajak seperti pajak pendapatan, hak milik, dan konsumsi terus mengalami peningkatan sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi Negara dari 45% menjadi 50%.

Pada awal 1820 an pembaruan kelembagaan dan ekspansi anggaran ini mengalami hambatan yaitu gubernur jenderal yang baru di angkat, D. Fock menekankan kebijakan keseimbangan anggaran. Sedangkan sebelumnya pemerintah sudah memutuskan agar mata uang antara Hindia Belanda di pisah, hal inilah yang kemudian menjadi penghambat kebijakan anggaran. Upaya yang dilakukan pemerintah Kolonial untuk mewujudkan keseimbangan anggaran adalah dengan memotong keseluruhan dipotong besar besaran hingga sekitar 700 gulden yang mengakibatkan terjadinya surplus anggaran pemerintahan pada tahun 1924-1926.

b. Kebijakan Pertanian

Kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan hasil pangan, pada tahun 1911 harga beras mengalami kenaikan dan untuk mendapatkan keuntungan pemerintah Kolonial meningkatkan ekspor ke pasar Cina dan Jepang. Perkembangan pasar dunia memperlihatkan peningkatan terhadap permintaan beras. Pada tahun 1918 pemerintah Kolonial membentuk dinas pusat penyaluran yang bertugas menyalurkan beras ke daerah-daerah terpencil. Keterlibatan pemerintah Kolonial dalam menangani permasalahan pangan/beras menunjukkan bahwa pemerintah terlalu campur tangan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat (Lapian & Lapian, 2012).

Departemen pertanian yang dibentuk oleh pemerintah Kolonial merupakan gabungan dari departemen pendidikan dan pegawai negeri. Departemen ini berpusat di kebun botani Bogor. Tujuan utama dari departemen ini adalah mengusahakan peningkatan penanaman padi di sawah, memperluas penanaman dan pengusahaan untuk melakukan penanaman pada lahan yang kering. Pemerintah kolonial bermaksud mengubah sistem pertanian Indonesia menjadi seperti di Barat. Upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah kolonial adalah membentuk koperasi yang bisa bermanfaat untuk merubah pola pikir masyarakat dari yang tradisional ke arah lebih modern.

c. Kebijakan Industri

Pada tanggal 25 September 1915 Gubernur Jenderal Idenburg membentuk panitia pembangunan industri di Hindia Belanda yang bertugas membuat perencanaan untuk membangun industri modern. Pembentukan lembaga ini terinspirasi oleh kemajuan yang dicapai Jepang dalam bidang industri. Setelah bekerja selama 2 tahun panitia yang dibentuk oleh pemerintah Kolonial ini memperoleh hasil yaitu



terciptanya landasan pembangunan industri dengan syarat pembangunan industri ini tidak lebih baik dari industri pusat (Lapian & Lapian, 2012).

Kondisi Masyarakat

Tetapi terlepas dari Kapitalisme Kolonial pada awal abad 20 yang membawa perkembangan yang baik, Pada masa awal pergerakan nasional Indonesia keadaan ekonomi bangsa Indonesia sangat memprihatinkan, banyak rakyat yang mengalami kekurangan bahan pangan dan kerugian dalam pekerjaan. Keadaan tersebut di akibatkan karena tindakan pemerintah Kolonialisme yang meng eksploitasi sumber daya Indonesia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kegiatan eksploitasi dari pemerintah Hindia Belanda juga menimbulkan terjadinya pertentangan-pertentangan dari masyarakat dan hal ini terjadi secara terus menerus. Kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda merupakan suatu usaha yang ditujukan untuk melindungi keadaan ekonomi mereka, agar tetap memperoleh banyak keuntungan.

Meskipun pemerintah Kolonial pada masa ini sudah menghapuskan istilah *wingewest* tetapi pemerintah Kolonial masih mengizinkan dan melegalkan eksplotasi modal secara perorangan. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa ekonomi politik Kolonial tetap menjadi yang utama ketimbang nasib dari rakyat jajahan yang terus berada dalam jurang kemiskinan. Keadaan ini mengakibatkan pertentangan terus terjadi di kalangan masyarakat dimana kehidupan masyarakat semakin tebelakang dan tidak mampu menyaingi kapitalisme pemerintah Hindia Belanda yang memiliki organisasi serta tekhnologi modern yang bisa mengubah kehidupan dan sistem ekonomi di Indonesia Selain itu sikap pemerintah Kolonial yang terus menerus melakukan eksploitasi



mengakibatkan masyarakat melakukan emansipasi atau perjuangan di bidang ekonomi. Keadaan masyarakat yang semakin tertekan akibat eksploitasi mengakibatkan solidaritas antar masyarakat semakin kuat. Solidaritas ini diwujudkan dengan aksi pembencian terhadap warga asing terutama orang Cina. Cina menjadi salah satu etnis luas yang paling dibenci karena keberadaan Cina menjadi penghambat pedagang lokal untuk mengembangkan perdagangannya. Aksi lain yang dilakukan dalam rangka menentang Kolonialisme yaitu, dalam setiap kongresnya rakyat melancarkan kritikan pedas terhadap sosial ekonomi yang memprihatinkan, kerja paksa, upah yang minimum, pajak tanah, tanah partikelir, industri gula dsb.

Situasi sosial ekonomi yang semakin memburuk menyebabkan pergerakan menjadi lebih radikal dan revolusioner. Pemogokan pegawai pegawai pegadaian pada 1922 dan pemogokan kaum buruh kereta api pada 1923 memanasifasikan kejengkelan kejengkelan hati terhadap Krisis sosial ekonomi yang terpaksa dijalankan oleh rakyat (Kartodirdjo & Baru, 1999). Modal Kolonial juga menghalangi setiap usaha ke arah emansipasi ekonomi sebab inti dari politik Kolonial yang dijalankan oleh penanam modal adalah menjaga agar tanah jajahan tetap memberikan keuntungan kepada negeri induk. Perjuangan terhadap penindasan dan eksploitasi ekonomi dilakukan terutama melalui jalan politik berdasarkan kesadaran bahwa kebebasan ekonomi hanya akan terwujud setelah kemerdekaan politik tercapai (Kartodirdjo, 1991).

Mata Pencaharian Masyarakat Indonesia

Sebagaimana yang telah dilaporkan oleh widjojo bahwa sebagian besar atau 96,7 % penduduk pribumi mempunyai mata pencaharian di Sektor pertanian termasuk pertanian rakyat, dalam Sektor ini masyarakat bekerja sebagai buruh perusahaan perkebunan besar, kehutanan, nelayan, dan peternakan. Diperkirakan ada satu juta jiwa



penduduk yang hidup sebagai buruh perusahaan perkebunan di luar Jawa. Diketahui bahwa masyarakat pribumi memiliki lebih dari satu sumber penghasilan mereka melakukan lebih dari satu pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya, hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia sangat rendah (Lapian & Lapian, 2012).

KESIMPULAN

Kapitalisme Kolonial pada awal abad 20 mengalami perkembangan yang bisa dikatakan sebagai perkembangan yang baik dan membawa keberuntungan. Hal ini di buktikan dengan semakin besarnya aliran emas di Indonesia, produksi gula yang meningkat, antara tahun 1904-1913. Selain emas dan gula hasil alam lain seperti teh, karet, tembakau, lada, beras, kapuk, dan timah juga mengalami peningkatan. Peningkatan hasil alam tersebut memberikan keuntungan karena produksi mengalami peningkatan yang pesat yaitu dari 75 juta gulden menjadi 305 juta gulden.

Dalam masa pemerintahannya pemerintah menerapkan beberapa kebijakan ekonomi di Indonesia diantaranya. (1) Kebijakan Anggaran dimana memasuki abad 20 ada perubahan di bidang keuangan pemerintahan. Dalam UU tahun 1903 di putuskan bahwa mata uang antara Hindia Belanda dan Belanda akan dipisahkan dan yang berkaitan dengan pembukuan yang mencatat pengeluaran pemerintahan untuk perusahaan swasta; (2) Kebijakan Pertanian dimana pada tahun 1918 pemerintah Kolonial membentuk dinas pusat penyaluran yang bertugas menyalurkan beras ke daerah-daerah terpencil; (3) Kebijakan Industri yaitu untuk membuat perencanaan membangun industri modern, Jenderal Indeburg membentuk panitia pembangunan industri Hindia



Belanda pada tanggal 25 September 1915. Pembentukannya terinspirasi dari kemajuan Jepang dalam bidang industri.

Kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Kolonial memberikan banyak dampak bagi kehidupan di Hindia Belanda. Tetapi diantara dampak tersebut, masyarakat Indonesia lebih banyak merasakan dampak negative yang memberikan kesengsaraan bagi kehidupan bangsa dan Negara. pemerintah Kolonial terlalu banyak mengeksploitasi kekayaan di Indonesia selain itu sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda dirasa tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoened, M., & Poesponegoro, N. N. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 5: Zaman Kebangkitan Nasional & Masa Hindia Belanda* (Vol. 5). Balai Pustaka (Persero), PT.
- Kartodirdjo, S. (1991). *Sejarah perkebunan di Indonesia: Kajian sosial-ekonomi*. Aditya Media.
- Kartodirdjo, S., & Baru, P. S. I. (1999). *Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo, D. R. (2005). *Pengantar ilmu sejarah*. Bentang Pustaka.
- Lapian, A. B., & Lapian, A. B. (2012). *Indonesia Dalam Arus Sejarah jilid 5 (Masa Pergerakan Kebangsaan)*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Prasetya Santosa, Y. B., & Noviyanti, R. (2020). Sejarah Perumnas Depok I: Perumahan Nasional Pertama di Indonesia (1974-1980). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(2), 110–126.
<https://doi.org/10.36706/jc.v9i2.11418>